



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TANGGAL 13 JUNI 2005

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PERNYATAAN NO. 03**

LAPORAN ARUS KAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN -----	1-10
Tujuan-----	1- 2
Ruang Lingkup-----	3-4
Manfaat Informasi Arus Kas-----	5-7
Definisi-----	8
Kas dan Setara Kas-----	9-10
ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS -----	11-13
PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS -----	14-34
Aktivitas Operasi-----	18-22
Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan-----	23-25
Aktivitas Pembiayaan-----	26-28
Aktivitas Nonanggaran-----	29-31
PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN NONANGGARAN -----	32-34
PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH -----	35
ARUS KAS MATA UANG ASING -----	36-38
BUNGA DAN BAGIAN LABA -----	39-42
INVESTASI DALAM PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH DAN KEMITRAAN -----	43-45
PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN NEGARA/ DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA -----	46-49
TRANSAKSI BUKAN KAS -----	50-51
KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS -----	52
PENGUNGKAPAN LAINNYA -----	53-55
TANGGAL EFEKTIF -----	56

LAMPIRAN :

Lampiran V.A : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat

Lampiran V.B : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi

Lampiran V.C : Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2 PERNYATAAN NO. 03

3 LAPORAN ARUS KAS

4 *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*
5 *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*
6 *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual*
7 *Akuntansi Pemerintahan.*

8 PENDAHULUAN

9 Tujuan

10 1. Tujuan Pernyataan Standar laporan arus kas adalah mengatur
11 penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai
12 perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan
13 mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset
14 nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode
15 akuntansi.

16 2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi
17 mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu
18 periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
19 Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan
20 keputusan.

21 Ruang Lingkup

22 3. *Pemerintah pusat dan daerah menyusun laporan arus kas*
23 *sesuai dengan standar ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai*
24 *salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode*
25 *penyajian laporan keuangan.*

26 4. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk penyusunan laporan*
27 *arus kas pemerintah pusat dan daerah, satuan organisasi di lingkungan*
28 *pemerintah pusat dan daerah, atau organisasi lainnya jika menurut*
29 *peraturan perundang-undangan atau menurut standar, satuan*
30 *organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali*
31 *perusahaan negara/daerah yang diatur tersendiri dalam Standar*
32 *Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.*

33 Manfaat Informasi Arus Kas

34 5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas
35 di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas
36 taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus
2 kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

3 7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan
4 arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan
5 dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas
6 pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan
7 solvabilitas).

8 **Definisi**

9 8. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
10 *Pernyataan Standar dengan pengertian :*

11 **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
12 pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
13 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik
14 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
15 uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
16 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
17 dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

18 **Anggaran** merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
19 pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan
20 pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut
21 klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

22 **Apropriasi** adalah anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan
23 mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk
24 melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

25 **Arus kas** adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
26 Bendahara Umum Negara/Daerah.

27 **Aktivitas operasi** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
28 ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode
29 akuntansi.

30 **Aktivitas investasi aset nonkeuangan** adalah aktivitas penerimaan dan
31 pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset
32 tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

33 **Aktivitas pembiayaan** adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu
34 dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali
35 yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi
36 jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah
37 sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus
38 anggaran.

39 **Aktivitas nonanggaran** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran
40 kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer,
41 dan pembiayaan pemerintah.

42 **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
43 Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
2 pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
4 kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat
5 dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

6 Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
7 selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

8 Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
9 lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
10 undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa
11 laporan keuangan.

12 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
13 penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
14 pemerintah.

15 Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
16 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

17 Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
18 oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan
19 daerah dan membayar seluruh pengeluaran-daerah.

20 Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan
21 oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
22 menampung seluruh penerimaan negara dan seluruh pengeluaran
23 negara.

24 Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
25 mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan
26 bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

27 Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

28 Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

29 Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam
30 menyajikan laporan keuangan.

31 Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
32 investasi berdasarkan harga perolehan.

33 Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
34 investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut
35 kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas
36 kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee)
37 yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

38 Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan
39 anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan
40 bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas
41 Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran
42 selama periode otorisasi tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum**
2 **Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode**
3 **tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan**
4 **tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.**

5 **Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara**
6 **Umum Negara/Daerah.**

7 **Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara**
8 **Umum Negara/Daerah.**

9 **Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan**
10 **entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun**
11 **anggaran.**

12 **Perusahaan negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau**
13 **sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah.**

14 **Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap**
15 **dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang**
16 **signifikan.**

17 **Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode**
18 **pelaporan.**

19 **Transfer masuk adalah penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan**
20 **lain termasuk penerimaan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil.**

21 **Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan**
22 **kepada entitas pelaporan lainnya termasuk pengeluaran untuk dana**
23 **perimbangan dan dana bagi hasil.**

24 **Kas dan Setara Kas**

25 9. Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
26 kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan
27 setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas
28 dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang
29 signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi
30 dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari
31 tanggal perolehannya.

32 10. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan
33 dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari
34 manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi
35 aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

36 **ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS**

37 11. **Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri
38 **dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan**
39 **perundang-undangan wajib menyampaikan laporan**
40 **pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:**

41 **(a) Pemerintah pusat;**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **(b) Pemerintah daerah; dan**

2 **(c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau**
3 **organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan**
4 **satuan organisasi dimaksud wajib membuat laporan arus kas.**

5 **12. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan**
6 **laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi**
7 **perbendaharaan**

8 13. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan
9 adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah
10 dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

11 **PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS**

12 **14. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan**
13 **pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan**
14 **berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan,**
15 **pembiayaan, dan nonanggaran.**

16 15. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset
17 nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang
18 memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas
19 tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut
20 juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi,
21 investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

22 16. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari
23 beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari
24 pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan
25 diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran
26 bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

27 17. Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran V.A-
28 C standar ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi untuk membantu
29 pemahaman dan bukan bagian dari standar.

30 **Aktivitas Operasi**

31 18. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang
32 menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang
33 cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang
34 tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

35 19. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

36 (a) Penerimaan Perpajakan;

37 (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

38 (c) Penerimaan Hibah;

39 (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi
40 Lainnya; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 (e) Transfer masuk.

2 20. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan
3 untuk pengeluaran:

4 (a) Belanja Pegawai;

5 (b) Belanja Barang;

6 (c) Bunga;

7 (d) Subsidi;

8 (e) Hibah;

9 (f) Bantuan Sosial;

10 (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan

11 (h) Transfer keluar.

12 **21. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga**
13 **yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka**
14 **perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan**
15 **sebagai aktivitas operasi.**

16 **22. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk**
17 **kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah**
18 **sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas**
19 **periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan**
20 **sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas**
21 **laporan keuangan.**

22 **Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan**

23 23. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan
24 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka
25 perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk
26 meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di
27 masa yang akan datang.

28 24. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan
29 terdiri dari:

30 (a) Penjualan Aset Tetap;

31 (b) Penjualan Aset Lainnya.

32 25. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan
33 terdiri dari :

34 (a) Perolehan Aset Tetap;

35 (b) Perolehan Aset Lainnya.

36 **Aktivitas Pembiayaan**

37 26. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan
38 dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim
2 pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap
3 pihak lain di masa yang akan datang.

4 27. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- 5 (a) Penerimaan Pinjaman;
6 (b) Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
7 (c) Penerimaan dari Divestasi;
8 (d) Penerimaan Kembali Pinjaman;
9 (e) Pencairan Dana Cadangan.

10 28. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- 11 (a) Penyertaan Modal Pemerintah;
12 (b) Pembayaran Pokok Pinjaman;
13 (c) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
14 (d) Pembentukan Dana Cadangan.

15 **Aktivitas Nonanggaran**

16 29. Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan
17 penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran
18 pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas
19 nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang.
20 PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari
21 Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga
22 misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi
23 kas antar rekening kas umum negara/daerah.

24 30. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi
25 penerimaan PFK dan kiriman uang masuk.

26 31. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi
27 pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

28 **PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS** 29 **OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN,** 30 **PEMBIAYAAN, DAN NONANGGARAN**

31 *32. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok*
32 *utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi,*
33 *investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran kecuali*
34 *yang tersebut dalam paragraf 35.*

35 *33. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas*
36 *operasi dengan cara:*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **(a) Metode Langsung**

2 *Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan*
3 *pengeluaran kas bruto.*

4 **(b) Metode Tidak Langsung**

5 *Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-*
6 *transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan*
7 *(accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang,*
8 *serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan*
9 *dengan aktivitas investasi aset nonkeuangan dan pembiayaan.*

10 34. Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya
11 menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas
12 operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

- 13 (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus
14 kas di masa yang akan datang;
- 15 (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- 16 (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat
17 langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

18 **PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS**
19 **KAS BERSIH**

20 35. *Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat*
21 *dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:*

- 22 (a) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima*
23 *manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan*
24 *aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah. Salah satu*
25 *contohnya adalah hasil kerjasama operasional.*
- 26 (b) *Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang*
27 *perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka*
28 *waktunya singkat.*

29 **ARUS KAS MATA UANG ASING**

30 36. *Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus*
31 *dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan*
32 *menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah*
33 *berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.*

34 37. *Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di*
35 *luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan*
36 *kurs pada tanggal transaksi.*

37 38. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat
38 perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BUNGA DAN BAGIAN LABA

39. *Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.*

40. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

41. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

42. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara/daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

INVESTASI DALAM PERUSAHAAN NEGARA/ DAERAH DAN KEMITRAAN

43. Pencatatan investasi pada perusahaan negara/ daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

44. *Investasi pemerintah dalam perusahaan negara/ daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.*

45. *Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.*

PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN NEGARA/DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA

46. *Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.*

47. *Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:*

(a) *Jumlah harga pembelian atau pelepasan;*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 **(b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan**
2 **dengan kas dan setara kas;**
- 3 **(c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan**
4 **unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan**
- 5 **(d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh**
6 **perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh**
7 **atau dilepas.**

8 48. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan negara/daerah
9 dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu
10 untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari
11 aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan
12 nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan
13 dengan perolehan investasi lainnya.

14 **49. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan**
15 **negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan**
16 **perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui**
17 **sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah**
18 **dan unit operasi lainnya.**

19 **TRANSAKSI BUKAN KAS**

20 **50. Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak**
21 **mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak**
22 **dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus**
23 **diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

24 51. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas
25 konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas
26 tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh
27 transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah
28 perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

29 **KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS**

30 **52. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan**
31 **setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos**
32 **terkait di Neraca.**

33 **PENGUNGKAPAN LAINNYA**

34 **53. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan**
35 **setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal**
36 **ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

37 54. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi
38 pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu
39 entitas pelaporan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 55. Jika apropriasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan
2 basis kas, laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami
3 hubungan antar aktivitas pelaporan atau program dan informasi
4 penganggaran pemerintah.

5 **TANGGAL EFEKTIF**

6 ***56. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku***
7 ***efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan***
8 ***anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.***

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V. A
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TANGGAL 13 JUNI 2005

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PUSAT
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	XXX	XXX
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	XXX	XXX
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	XXX	XXX
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	XXX	XXX
7	Pendapatan Cukai	XXX	XXX
8	Pendapatan Bea Masuk	XXX	XXX
9	Pendapatan Pajak Ekspor	XXX	XXX
10	Pendapatan Pajak Lainnya	XXX	XXX
11	Pendapatan Sumber Daya Alam	XXX	XXX
12	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	XXX	XXX
13	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	XXX	XXX
14	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
15	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 14)	XXX	XXX
16	Arus Keluar Kas		
17	Belanja Pegawai	XXX	XXX
18	Belanja Barang	XXX	XXX
19	Bunga	XXX	XXX
20	Subsidi	XXX	XXX
21	Hibah	XXX	XXX
22	Bantuan Sosial	XXX	XXX
23	Belanja Lain-lain	XXX	XXX
24	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
25	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
26	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
27	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
28	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
29	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
30	Jumlah Arus Keluar Kas (17 s/d 29)	XXX	XXX
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (15 - 30)	XXX	XXX
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38	Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
39	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)	XXX	XXX
41	Arus Keluar Kas		
42	Belanja Tanah	XXX	XXX
43	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
44	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
48	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)	XXX	XXX
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PUSAT
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
51	Arus Masuk Kas		
52	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
53	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
54	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
55	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX
56	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
57	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
58	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX
60	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 59)	XXX	XXX
61	Arus Keluar Kas		
62	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
63	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
64	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
65	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	XXX	XXX
66	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
67	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX
69	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX
70	Jumlah Arus Keluar Kas (62 s/d 69)	XXX	XXX
71	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (60 - 70)	XXX	XXX
72	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
73	Arus Masuk Kas		
74	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
75	Kiriman Uang Masuk	XXX	XXX
76	Jumlah Arus Masuk Kas (74 s/d 75)	XXX	XXX
77	Arus Keluar Kas		
78	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	Kiriman Uang Keluar	XXX	XXX
80	Jumlah Arus Keluar Kas (78 s/d 79)	XXX	XXX
81	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (76 - 80)	XXX	XXX
82	Kenaikan/Penurunan Kas (31 + 49 + 71 + 81)	XXX	XXX
83	Saldo Awal Kas di BUN	XXX	XXX
84	Saldo Akhir Kas di BUN (82 + 83)	XXX	XXX
85	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
86	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
87	Saldo Akhir Kas (84 + 85 + 86)	XXX	XXX

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V. B
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TANGGAL 13 JUNI 2005

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
14	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
15	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)	XXX	XXX
17	Arus Keluar Kas		
18	Belanja Pegawai	XXX	XXX
19	Belanja Barang	XXX	XXX
20	Bunga	XXX	XXX
21	Subsidi	XXX	XXX
22	Hibah	XXX	XXX
23	Bantuan Sosial	XXX	XXX
24	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
25	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
26	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	XXX	XXX
28	Jumlah Arus Keluar Kas (18 s/d 27)	XXX	XXX
29	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 28)	XXX	XXX
30	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
31	Arus Masuk Kas		
32	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
33	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
34	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
36	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
37	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
38	Jumlah Arus Masuk Kas (32 s/d 37)	XXX	XXX
39	Arus Keluar Kas		
40	Belanja Tanah	XXX	XXX
41	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
42	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
45	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
46	Jumlah Arus Keluar Kas (40 s/d 45)	XXX	XXX
47	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (38 - 46)	XXX	XXX
48	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
49	Arus Masuk Kas		
50	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
51	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
52	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH PROVINSI
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
53	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
58	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
59	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
61	Jumlah Arus Masuk Kas (50 s/d 60)	XXX	XXX
62	Arus Keluar Kas		
63	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
64	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
66	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
71	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
72	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
74	Jumlah Arus Keluar Kas (63 s/d 73)	XXX	XXX
75	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (61 - 74)	XXX	XXX
76	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
77	Arus Masuk Kas		
78	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	Jumlah Arus Masuk Kas (78 s/d 78)	XXX	XXX
80	Arus Keluar Kas		
81	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
82	Jumlah Arus Keluar Kas (81 s/d 81)	XXX	XXX
83	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (79 - 82)	XXX	XXX
84	Kenaikan/Penurunan Kas (29 + 47 + 75 + 83)	XXX	XXX
85	Saldo Awal Kas di BUD	XXX	XXX
86	Saldo Akhir Kas di BUD (84 + 85)	XXX	XXX
87	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
88	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
89	Saldo Akhir Kas (86 + 87 + 88)	XXX	XXX

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V. C
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2005
TANGGAL 13 JUNI 2005

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
16	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	XXX	XXX
19	Arus Keluar Kas		
20	Belanja Pegawai	XXX	XXX
21	Belanja Barang	XXX	XXX
22	Bunga	XXX	XXX
23	Subsidi	XXX	XXX
24	Hibah	XXX	XXX
25	Bantuan Sosial	XXX	XXX
26	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
28	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
30	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)	XXX	XXX
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)	XXX	XXX
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)	XXX	XXX
41	Arus Keluar Kas		
42	Belanja Tanah	XXX	XXX
43	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
44	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
48	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)	XXX	XXX
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)	XXX	XXX



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
51	Arus Masuk Kas		
52	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
58	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
63	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)	XXX	XXX
64	Arus Keluar Kas		
65	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
75	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
76	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 75)	XXX	XXX
77	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (64 - 76)	XXX	XXX
78	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
79	Arus Masuk Kas		
80	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
81	Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 80)	XXX	XXX
82	Arus Keluar Kas		
83	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
84	Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)	XXX	XXX
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 - 84)	XXX	XXX
86	Kenaikan/Penurunan Kas (31 + 49 + 77 + 85)	XXX	XXX
87	Saldo Awal Kas di BUD	XXX	XXX
88	Saldo Akhir Kas di BUD (86 + 87)	XXX	XXX
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
91	Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)	XXX	XXX

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.